

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana yang telah dibahas dan dijelaskan pada Bab 4, maka kesimpulan atas penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum secara parsial mempunyai pengaruh negatif (koefisien regresi sebesar 0,495) dan tidak signifikan (nilai signifikansi 0,625) terhadap aktivitas rutin penyelundupan manusia pada masyarakat, sehingga dapat diartikan semakin tinggi penegakan hukum menurunkan nilai aktivitas rutin yang berarti dapat meningkatkan penyelundupan manusia di pesisir provinsi Jawa Barat.
- b. Partisipasi masyarakat secara parsial mempunyai pengaruh positif (koefisien regresi sebesar 2,549) dan signifikan (nilai signifikansi 0,01) terhadap penyelundupan manusia. Sehingga dapat diartikan semakin tinggi partisipasi masyarakat meningkatkan nilai aktivitas rutin yang berarti dapat menurunkan penyelundupan manusia di pesisir Provinsi Jawa Barat.
- c. Penegakan hukum dan partisipasi masyarakat secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang positif ($F_{hitung} 2,252 < F_{tabel} 2,99$) dan tidak signifikan (nilai signifikan 0,1 > nilai signifikan yang ditentukan 0,05) terhadap aktivitas rutin penyelundupan manusia pada masyarakat, sehingga dapat diartikan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat tidak menimbulkan pengaruh yang berarti dalam menanggulangi penyelundupan manusia pada masyarakat di pesisir Provinsi Jawa Barat.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Teoritis

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pertahanan khususnya keamanan maritim yang dikaitkan dengan penyelundupan manusia, pada penegakan hukum yakni :

- a. Secara umum dari ke empat dimensi yang ada, dimensi masyarakat merupakan yang paling rendah dengan nilai 2,88. Adapun untuk indikator terendah terdapat pada indikator “kesadaran masyarakat terhadap peraturan penyelundupan manusia”. Sehingga kedepannya para peneliti sebaiknya berfokus mendalami penelitian di bidang pembinaan kesadaran hukum pada masyarakat pesisir oleh penegak hukum dalam rangka meningkatkan budaya hukum.
- b. Kemudian selain dari dimensi masyarakat, dimensi yang perlu diperhatikan adalah dimensi sarana prasarana, dengan nilai skor 3,02. Ini pun merupakan indikator yang berada pada zona netral sehingga tetap perlu diperhatikan. Adapun untuk indikator terendah terdapat pada indikator “Peralatan dan prasarana dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam penyelundupan manusia sudah mencukupi”. Sehingga kedepannya para peneliti sebaiknya meneliti keefektifan sarana dan prasarana dalam mencegah penyelundupan manusia pada masyarakat di kawasan pesisir Provinsi Jawa Barat.

Kemudian dari partisipasi masyarakat sendiri secara umum sudah baik, tetapi masih perlu adanya peningkatan, diantara lain yaitu :

- a. Secara umum dari ke empat dimensi yang ada, dimensi masyarakat merupakan yang paling rendah dengan nilai 2,69. Adapun untuk indikator terendah terdapat pada indikator “membentuk dan mempengaruhi kebijakan kepolisian”. Sehingga kedepannya peneliti perlu berfokus pada upaya meningkatkan kemitraan antara penegak hukum dan masyarakat pesisir khususnya di Provinsi Jawa Barat supaya intervensi terhadap penyelundupan pada tahap komunitas bisa lebih efektif dan efisien.

5.2.2. Saran Praktis

Berdasarkan uraian yang sudah dibahas dalam bab hasil dan pembahasan. Adapun saran praktis untuk penelitian ini dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain :

- a. Bagi para penegak hukum di kawasan pesisir Provinsi Jawa Barat perlu berfokus untuk meningkatkan kesadaran terhadap peraturan yang berlaku bagi masyarakat khususnya peraturan mengenai penyelundupan manusia dengan pendekatan yang sesuai dengan masyarakat.
- b. Para penegak hukum perlu memfokuskan sarana prasarana pendukung yang ada sehingga penanganan aktivitas penyelundupan manusia pada masyarakat di pesisir provinsi jawa barat dapat lebih optimal.

Kemudian dari partisipasi masyarakat sendiri secara umum sudah baik, tetapi masih perlu adanya peningkatan, diantara lain yaitu :

- a. Perlu dibentuk tim inspeksi bersama untuk masyarakat pesisir dalam mengurangi aktivitas penyelundupan manusia dengan para penegak hukum dan pemerintah yang bersama-sama melakukan patroli rutin. Pada siang dan malam hari patroli ini mengumpulkan informasi tentang masalah yang disebabkan kehadiran fisik pelaku pelaku penyelundupan manusia. Penilaian gangguan tersebut dievaluasi oleh polisi dan pemerintah sehingga dapat melakukan tindakan yang efektif pada tempat dan waktu yang tepat. Hal ini memungkinkan pembuat kebijakan dan warga negara untuk merancang intervensi terfokus yang menangani kejahatan dan kekacauan komunal. Sumberdaya kepolisian menjadi lebih disesuaikan untuk menangani titik kejahatan tertentu.